

IMPLEMENTASI PROGRAM DESA WISATA DI DESA SAWAHAN KECAMATAN WATULIMO KABUPATEN TRENGGALEK

Yolanda Jihan Azhari

Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Negeri
Surabaya Yolanda.22117@mhs.unesa.ac.id

Tjitjik Rahaju

Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Negeri
Surabaya tjitjikrahaju@unesa.ac.id

Indah Prabawati

Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Negeri
Surabaya indahprabawati@unesa.ac.id

Ahmad Nizar Hilmi

Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Negeri
Surabaya ahmadhilmi@unesa.ac.id

ABSTRAK

Pariwisata memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang pengelolaannya kini diarahkan pada pendekatan *Community Based Tourism* (CBT). Konsep ini mendorong pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata yang mengintegrasikan potensi alam, buatan, dan budaya secara partisipatif. Desa Sawahan di Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu desa yang mengembangkan program desa wisata. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi Program Desa Wisata di Desa Sawahan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan teori implementasi kebijakan *bottom-up* menurut Elmore, Lipsky, O'Porter, dan Hjern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program melibatkan jaringan aktor, yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek, pemerintah desa, Pokdarwis Duren Sari, dan masyarakat. Kebijakan bersifat *bottom-up*, tercermin dari pengelolaan paket wisata dan unit usaha homestay oleh masyarakat sebagai pelaksana utama, sementara pemerintah desa berperan sebagai pembina dan dinas sebagai penasihat. Meskipun peran aktor telah berjalan cukup baik, evaluasi program belum dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan, serta pelatihan dari dinas belum optimal. Partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda, juga masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi rutin, peningkatan kapasitas pengelola, serta inovasi atraksi wisata agar manfaat program lebih dirasakan secara merata dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Implementasi, Desa Wisata, Pariwisata Berbasis Komunitas

ABSTRACT

Tourism plays a crucial role in economic development and improving community welfare, with management currently focused on the Community-Based Tourism (CBT) approach. This concept encourages community empowerment through the development of tourism villages that integrate natural, man-made, and cultural potential in a participatory manner. Sawahan Village in Watulimo District, Trenggalek Regency, is one of the villages developing a tourism village program. However, its implementation still faces several obstacles. This study aims to describe the implementation of the

Tourism Village Program in Sawahan Village. The method used is descriptive qualitative with a bottom-up policy implementation theory approach according to Elmore, Lipsky, O'Porter, and Hjern. The results show that program implementation involves a network of actors, namely the Trenggalek Regency Tourism and Culture Office, the village government, the Duren Sari Tourism Group (Pokdarwis), and the community. The bottom-up policy approach is reflected in the management of tourism packages and homestay businesses by the community as the primary implementer, while the village government acts as a supervisor and the agency as an advisor. Although the actors' roles have been quite successful, program evaluation has not been conducted in a structured and sustainable manner, and training from the agency has not been optimal. Community participation, especially among the younger generation, is also still limited. Therefore, regular evaluation, capacity building of managers, and innovation of tourist attractions are needed so that the benefits of the program are felt more evenly and sustainably.

Keywords: *Implementation, Tourism Village, Community Based Tourism*

PENDAHULUAN

Keberadaan pariwisata memiliki peran vital dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja baru, serta berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pariwisata merupakan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan perjalanan seseorang dari tempat tinggal asal menuju satu atau beberapa lokasi tujuan di luar lingkungan tempat tinggalnya untuk kepentingan tertentu, tanpa tujuan untuk memperoleh penghasilan (Gunn, 2002). Menurut *World Travel & Tourism Council* (2024), industri pariwisata memberikan kontribusi lebih dari sepersepuluh terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) dunia secara langsung maupun tidak langsung, menjadikannya sebagai salah satu motor penggerak ekonomi dunia. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2023) menyebutkan bahwa sektor ini memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian nasional melalui peningkatan devisa negara, penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan masyarakat di sekitar destinasi wisata.

Seiring dengan berkembangnya konsep pariwisata berkelanjutan, orientasi pengelolaan tujuannya bukan semata untuk menambah penerimaan daerah, melainkan juga untuk memperkuat peran serta dan kemandirian masyarakat setempat, sebagai pelaku utama dalam kegiatan wisata (Widodo, 2019). Pendekatan *Community Based Tourism* dinilai mampu mendorong keberlanjutan

pengembangan wisata melalui pelibatan aktif masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi (Mandasari & Prabawati, 2021). Melalui implementasi pendekatan *Community Based Tourism* (CBT), lahir gagasan pengembangan desa wisata sebagai model pariwisata yang menjadikan masyarakat setempat sebagai aktor utama dalam mengelola, mengembangkan, serta menjaga keberlanjutan potensi wisata yang terdapat di desa (Pitana & Gayatri, 2005).

Dalam konteks desa wisata, partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan desa wisata (Giampiccoli, 2020). Tamianingsih dan Eprilianto (2022) menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi kunci dalam proses pengembangan desa wisata berbasis komunitas sebab berpengaruh terhadap keberlanjutan serta efektivitas implementasi kebijakan pariwisata desa. Artinya keberhasilannya tidak semata ditentukan oleh potensi sumber daya alam dan budaya yang dimiliki, melainkan juga oleh tingkat keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan.

Selain partisipasi, aspek tata kelola juga menjadi salah satu elemen yang berperan signifikan dalam kemajuan desa wisata. Pradana et al. (2021) menyatakan bahwa pengelolaan desa wisata membutuhkan prinsip *good tourism governance* agar kebijakan pariwisata dapat berjalan secara efektif, transparan, dan partisipatif. Dengan demikian, pengembangan desa wisata menuntut sinergi antara masyarakat sebagai pelaksana utama dan

pemerintah sebagai fasilitator yang memastikan kebijakan berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.

Pengembangan desa wisata di China menjadi contoh keberhasilan pengelolaan potensi alam dan budaya secara berkelanjutan. Salah satunya terdapat di kawasan Guilin, khususnya Longji Rice Terrace Scenic Spot, yang dikelola melalui kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal dengan memanfaatkan lanskap terasering serta budaya etnis sebagai daya tarik utama (Sun et al., 2025). Keberhasilan tersebut didukung oleh peran pemerintah dalam kebijakan dan infrastruktur, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi wisata, serta pemanfaatan teknologi digital sebagai media promosi (Zheng et al., 2024). Adapun di Indonesia perkembangan desa wisata menunjukkan pertumbuhan yang pesat seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap konsep pariwisata berbasis masyarakat dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Desa wisata di Indonesia tidak hanya menonjolkan atraksi berbasis alam dan budaya, tetapi juga memberikan peluang bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan destinasi serta memperoleh manfaat ekonomi secara langsung (Santoso et al., 2021)

Di Indonesia Program desa wisata mengalami peningkatan yang signifikan dalam satu dekade terakhir. Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia melalui Jejaring Desa Wisata (2025), hingga tahun 2025 tercatat sebanyak 6.158 desa wisata telah terdaftar di seluruh Indonesia. Jika dilihat dari sebaran desa wisata di seluruh Indonesia, Di antara berbagai provinsi di Indonesia, Jawa Timur berada pada peringkat pertama dengan jumlah 603 desa wisata. Dari total 38 kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur, Kabupaten Trenggalek merupakan salah satunya yang termasuk dalam enam daerah dengan jumlah desa wisata terbanyak. Hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Sepuluh Besar Desa Wisata di Provinsi Jawa Timur

Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Wisata
Kabupaten Banyuwangi	61 desa wisata
Kabupaten Jember	49 desa wisata
Kabupaten Malang	48 desa wisata
Kabupaten Ponorogo	38 desa Wisata
Kabupaten Blitar	37 desa wisata
Kabupaten Trenggalek	36 desa wisata
Kabupaten Gresik	31 Desa wisata
Kabupaten Magetan	28 Desa Wisata
Kota Batu	24 Desa Wisata

Sumber : Jadesta Kemenparekraf, 2025

Posisi ini menunjukkan bahwa Trenggalek memiliki semangat kuat dalam mengembangkan potensi desa wisata sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dan memperkenalkan kekayaan budaya serta alamnya kepada wisatawan. Sebagai wujud keseriusan pemerintah daerah dalam memperkuat peran pariwisata bagi perekonomian masyarakat, Kabupaten Trenggalek telah menetapkan sejumlah 36 desa wisata yang tersebar di berbagai kecamatan. Mengenai peta persebaran desa wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2. Data Desa wisata yang berada di Kabupaten Trenggalek

No.	Kecamatan	Total
1.	Watulimo	4
2.	Trenggalek	3
3.	Tugu	2
4.	Bendungan	3
5.	Dongko	3
6.	Gandusari	3
7.	Munjungan	5
8.	Durenan	1
9.	Karangan	3
10.	Pogalan	1
11.	Pule	1
12.	Suruh	2
13.	Kampak	1
14.	Panggul	3
Total		36

Sumber :Jadesta Kemenparekraf, 2025

Berdasarkan tabel di atas, Kecamatan Watulimo justru menjadi salah satu wilayah yang memiliki desa wisata dengan prestasi menonjol, yaitu Desa Wisata Sawahan. Desa wisata ini terletak di Desa Sawahan, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, dan dikenal sebagai salah satu destinasi unggulan yang berhasil mengoptimalkan potensi alam dan budaya lokal secara terpadu.



Gambar 1. Suasana di Hutan Durian Desa Wisata Sawahan

Sumber : Jatim Jadesta, 2024

Pengelolaannya mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2021 tentang Desa Wisata, yang menjadi dasar hukum pengembangan dan pengelolaan desa wisata di Kabupaten Trenggalek. Selanjutnya, secara teknis pengelolaan di tingkat desa diperkuat melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek Nomor 556/141/35.03.025/2017 tentang Pengukuhan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) “Duren Sari” Desa Sawahan Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek sebagai pengelola desa wisata. Desa Wisata Sawahan Sawahan berhasil meraih sejumlah prestasi, salah satunya ditetapkan sebagai salah satu desa wisata unggulan di Jawa Timur pada tahun 2019 yang pengembangannya didasarkan pada pendekatan Community Based Tourism (CBT), Desa Wisata Sawahan ditetapkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek sebagai salah satu *role model* dalam mendukung program unggulan pemerintah daerah di bidang pariwisata. Adapun daya Tarik yang dimiliki Desa Wisata Sawahan dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori utama.

Identifikasi masing-masing daya Tarik wisata tersebut disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Potensi Atraksi Wisata di Desa Wisata Sawahan

No.	Daya tarik	Jenis wisata
1	Wisata Alam	River Tubing, <i>Trekking Internasional Durio Forestry, Healing Bawok River</i>
2	Wisata Budaya	Permainan tradisional, Belajar Karawitan, Edukasi Batik Tulis Dlongop Duren Sari Sawahan, Edukasi Kerajinan Reyeng, Belajar Huruf Dentawiyanjana
3	Wisata Kuliner	Sajian khas Desa Duren Sari meliputi wedang jesar minuman tradisional berbahan jahe, serai, dan gula aren, serta kuliner lokal seperti sampil, tiwul jambul, dan nasi kluwak. Maupun olahan durian Cimplung.
4	Wisata buatan	Edukasi pengolahan gula aren, Edukasi Sambung Pucuk Durian

Sumber : Jatim Jadesta, 2024

Meskipun Desa Wisata Sawahan telah menunjukkan berbagai keberhasilan dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala. Koordinasi antar anggota Pokdarwis belum optimal karena pertemuan rutin jarang dilakukan dan komunikasi hanya terjadi saat ada kegiatan tertentu, sehingga informasi antar anggota tidak merata. Selain itu, keterlibatan masyarakat, khususnya pemuda, masih rendah, sehingga partisipasi belum merata di seluruh lapisan masyarakat. Aktivitas wisata masih bersifat musiman, terutama meningkat saat panen durian, sehingga pendapatan masyarakat belum stabil dan peluang ekonomi belum berkelanjutan.



Gambar 2. Data Pengunjung Desa Wisata Sawahan 2024-2025

Sumber : Pokdarwis, 2025

Data kunjungan wisatawan juga menunjukkan minimnya inisiatif masyarakat untuk mengembangkan atraksi atau produk wisata tambahan. Kondisi ini mencerminkan perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan desa wisata. Secara keseluruhan, Desa Wisata Sawahan memiliki potensi besar untuk membangun tata kelola pariwisata yang berkelanjutan melalui partisipasi masyarakat, namun implementasinya masih terbatas oleh kendala koordinasi, partisipasi, dan keberlanjutan ekonomi.

Dari beberapa kendala yang muncul dalam pelaksanaan Desa Wisata Sawahan hal ini menjadikan aspek menarik bagi peneliti untuk menganalisis implementasi Desa Wisata Sawahan dalam upaya mengembangkan potensi pariwisata di Desa Sawahan Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, dengan menggunakan teori model *bottom up* oleh Elmore, Lipsky, Hjern, dan O'Porter (dalam Tahir, 2011).

Keberadaan Desa Wisata Sawahan tidak terlepas dari Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pengembangan desa wisata di Kabupaten Trenggalek. Secara formal, desa wisata ini merupakan bagian dari konstruksi kebijakan pemerintah daerah yang mendorong desa mengembangkan potensi wisata sebagai strategi peningkatan ekonomi masyarakat. Namun demikian, pembentukan dan pengembangannya tidak semata-mata didorong oleh kebijakan dari atas, melainkan juga oleh kebutuhan serta inisiatif masyarakat dalam mengelola potensi alam dan sumber daya yang dimiliki.

Penelitian ini menggunakan perspektif *bottom-up* untuk melihat bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di tingkat desa serta bagaimana respons masyarakat dan pengelola sebagai kelompok sasaran. Pendekatan ini digunakan untuk menilai kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan masyarakat serta mengidentifikasi tantangan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, peneliti mengambil judul penelitian "Implementasi Program Desa Wisata di Desa Sawahan, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek", dengan tujuan untuk mendeskripsikan implementasi program desa wisata di Desa Sawahan Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif dipilih karena bertujuan untuk memaparkan serta menjelaskan kondisi yang terjadi pada objek maupun subjek yang diteliti secara apa adanya sesuai dengan fakta di lapangan. Menurut Sugiyono (2020:8), metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang dilakukan pada situasi yang bersifat alami atau *natural setting*, sehingga peneliti dapat memahami fenomena yang terjadi secara lebih mendalam.

Dalam pelaksanaan penelitian, penentuan fokus penelitian menjadi hal yang sangat penting. Penetapan fokus dilakukan agar proses penelitian tetap terarah dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada penelitian kualitatif, fokus penelitian berfungsi sebagai batasan dalam mengkaji permasalahan yang diteliti sehingga penelitian dapat lebih terarah dalam menemukan solusi atas permasalahan yang dikaji. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada teori implementasi kebijakan *bottom-up* yang dikemukakan oleh Richard Elmore, Michael Lipsky, Benny Hjern, dan David O'Porter (dalam Tahir, 2011:136), sehingga sub fokus dalam penelitian ini meliputi identifikasi jaringan aktor yang terlibat; jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya, atau masih melibatkan pejabat pemerintah di level bawah; kebijakan yang

dibuat sesuai harapan keinginan publik yang menjadi target; prakarsa masyarakat secara langsung atau melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Subjek dalam penelitian ini adalah individu-individu yang dinilai memiliki pengetahuan serta pemahaman mengenai permasalahan yang diteliti sehingga dapat memberikan informasi yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Penentuan subjek penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan fokus penelitian.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik, yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi guna memperoleh data yang lengkap dari berbagai sumber. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (dalam Sugiyono, 2011:247). Model analisis ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Sawahan secara administratif terletak di Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Desa ini berlokasi tidak jauh dari beberapa destinasi wisata pantai, seperti Pantai Prigi, Pantai Pasir Putih, dan Pantai Mutiara. Jarak tempuh dari pusat kota menuju Desa Sawahan kurang lebih 45 kilometer. Secara geografis, wilayah Desa Sawahan didominasi oleh kawasan pegunungan dan dataran tinggi. Akses menuju Desa Sawahan tergolong cukup baik karena telah didukung oleh jalan beraspal. Namun, mengingat letaknya di daerah pegunungan, jalur yang dilalui cenderung menanjak dan berkelok.

Pada tahun 2025, penduduk Desa Sawahan yang termasuk dalam kelompok usia produktif berada pada kisaran umur 17 hingga 55 tahun. Kondisi tersebut menjadi aset penting dalam penyediaan tenaga kerja yang produktif sekaligus mendukung ketersediaan sumber daya manusia. Dengan demikian, Desa Sawahan memiliki peluang yang cukup besar apabila

dilihat dari banyaknya penduduk yang berada pada usia produktif. Potensi ini dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan serta memaksimalkan berbagai potensi desa, salah satunya melalui pengelolaan desa wisata.

A. Deskripsi Program Desa Wisata Sawahan

Desa Wisata Sawahan mengaplikasikan konsep *Community Based Tourism* (CBT), yaitu pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan wisata melibatkan masyarakat desa secara aktif. Pengelolaan tidak semata-mata berfokus pada aspek keuntungan finansial, melainkan juga memperhatikan aspek pemberdayaan masyarakat lokal, pelestarian lingkungan, serta penguatan nilai sosial dan budaya desa. Masyarakat berperan sebagai pelaku utama, mulai dari pengelola paket wisata, pemandu, pengelola homestay, hingga penyedia kuliner.



Gambar 3. Sekretariat Pokdarwis Duren Sari

Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2025

Berdasarkan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor: 188.45/95/406.001.3/2023 tentang Penetapan Desa Wisata, Desa Wisata Sawahan ditetapkan sebagai Desa Wisata Maju. Penetapan tersebut hasil tersebut tidak dicapai secara langsung, tetapi melalui tahapan proses yang bertahap dan berkelanjutan. Pada awal pembentukannya Desa Wisata Sawahan sempat mengalami kevakuman akibat keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola aktivitas pariwisata. Namun, pada tahun 2017 desa wisata ini mulai bangkit kembali melalui pembenahan kelembagaan dan peningkatan kapasitas pengelola. Selanjutnya,

melalui peningkatan kualitas pengelolaan, penataan paket wisata, penguatan peran Pokdarwis, serta konsistensi partisipasi masyarakat, pada tahun 2023 Desa Wisata Sawahan resmi ditetapkan sebagai Desa Wisata Maju.

Desa Wisata Sawahan dikatakan maju karena telah memenuhi sejumlah kriteria, di antaranya masyarakat sudah sepenuhnya sadar akan potensi wisata yang dimiliki beserta pentingnya pengembangan berkelanjutan. Wilayah desa ini kini telah mengalami perkembangan hingga menjadi salah satu tujuan wisata yang mulai dikenal luas dan banyak menarik kedatangan pengunjung, terutama di musim durian, termasuk oleh wisatawan mancanegara. Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana pariwisata telah memadai dalam mendukung kenyamanan para pengunjung, serta masyarakat telah memiliki kemampuan dalam mengelola usaha pariwisata secara kolektif melalui Pokdarwis. Dengan demikian, predikat Desa Wisata Maju merupakan hasil dari proses panjang penguatan kapasitas dan tata kelola yang terus dilakukan secara konsisten.

Dalam memasarkan produknya, Desa Wisata Sawahan mengemas atraksi dalam bentuk paket wisata yang disesuaikan dengan potensi lokal desa. Saat ini tersedia tujuh paket wisata yang dapat dipilih wisatawan saat berkunjung, yaitu:

1. Jelajah Alas Duren (*Trekking IDF / International Durio Forestry*): *trekking* di hutan durian seluas ±650 ha, berendam di Kali Bawok.
2. Dolan Bareng ing Watulawang (Outbound Watulawang): aktivitas wisata di Sungai Watulawang, permainan tradisional dan outbound, genduri durian.
3. *Adventure to The Ngrancah*: wisata petualangan sehari penuh, berkunjung ke Ngrancah, panen badeg.
4. Paket Edukasi: pembelajaran budaya dan pengolahan durian, kegiatan seni karawitan, pengenalan huruf Jawa, pengolahan durian.
5. *Live In* Paket Duren 1 (1 hari 1 malam): jelajah hutan durian, edukasi sambung pucuk, permainan tradisional.
6. *Live In* Paket Duren 2 (2 hari 1 malam): permainan air, edukasi pengolahan durian, kerajinan reyeng, karawitan.

7. *Live In* Paket Duren 3 (3 hari 2 malam): *adventure* ke Ngrancah, eksplorasi IDF, panen durian musiman, pengolahan gula aren, karawitan, genduri durian.

B. Implementasi Program Desa Wisata Sawahan di Desa Sawahan Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek

Implementasi Program Desa Wisata di Desa Sawahan Kecamatan Watulimo dalam penelitian ini dianalisis berdasarkan variabel implementasi model kebijakan *bottom up* menurut Elmore, Lipsky, Hjren & O'Porter. Hasil penelitian mengenai Implementasi Program Wisata di Desa Sawahan dapat dipaparkan sebagai berikut :

1. Identifikasi Jaringan aktor yang terlibat Identifikasi Jaringan Aktor yang Terlibat Jaringan aktor yang terlibat

Richard Elmore (1979), Michael Lipsky (1979), serta Benny Hjren dan David O'Porter (1981) mengemukakan model implementasi yang memiliki kesamaan substansi meskipun dikembangkan secara terpisah. Model tersebut diawali dengan identifikasi jaringan aktor dalam implementasi kebijakan. Jaringan aktor tersebut berkaitan erat dengan tugas, tanggung jawab, serta pola interaksi antar pelaksana kebijakan, termasuk sumber daya manusia yang berperan dalam pengelolaan Desa Wisata Sawahan.

Dalam implementasi program desa wisata di Desa Wisata Sawahan Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek adalah sumber daya manusia pengelola yang meliputi struktur kepengurusan Pokdarwis, yaitu ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara, sie lingkungan, sie humas, sie pengembangan usaha, sie homestay, sie pemandu, kuliner dan cinderamata, sie pemasaran dan anggota yang terdiri dari 11 orang. Dan ditingkat kabupaten ada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai penasehat dan kepala desa Sawahan sebagai pelindung yang dimana setiap pihak tersebut menjalankan perannya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan mengenai pengelolaan desa wisata. Keterlibatan berbagai pihak tersebut kemudian membentuk suatu

jaringan aktor yang dapat dijelaskan melalui beberapa tahapan berikut.

a. Tahap Persiapan

Tahapan persiapan dilakukan terlebih dahulu sebelum perumusan Program Desa Wisata Sawahan dengan melibatkan berbagai aktor, yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek, Pemerintah Desa Sawahan, tokoh masyarakat, pegiat budaya, serta perwakilan masyarakat. Pemerintah desa berperan sebagai fasilitator dalam musyawarah desa, sementara tokoh masyarakat dan pegiat budaya memberikan pandangan terkait pelestarian nilai lokal, serta masyarakat menyampaikan aspirasi mengenai potensi dan kebutuhan ekonomi.

Pada tahap ini juga ditetapkan Ketua Pokdarwis melalui musyawarah desa, yaitu Saudari Unik Winarsih, berdasarkan komitmen dan kesediaan untuk mengembangkan desa wisata. Keanggotaan Pokdarwis terbentuk secara sukarela dari masyarakat yang bersedia berpartisipasi.

Persiapan turut diwujudkan melalui sosialisasi dan koordinasi dengan Dinas Pariwisata dalam proses identifikasi serta inventarisasi potensi desa. Pemetaan dilakukan secara partisipatif, mencakup aset individu, sumber daya alam, ekonomi, kelembagaan, serta aset fisik dan non fisik. Berbagai potensi yang teridentifikasi antara lain keterampilan membuat kuliner, kerajinan bambu, pemandu wisata, permainan dan musik tradisional, budidaya durian, serta potensi alam berupa tiga air terjun.

Melalui forum musyawarah, masyarakat menyepakati yakni pengembangan desa wisata difokuskan pada pemanfaatan potensi yang dimiliki desa secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, tahap persiapan menjadi landasan penting dalam membangun komitmen bersama dan merumuskan program berdasarkan potensi serta kebutuhan riil Desa Sawahan.

b. Tahap Perumusan

Tahap perumusan Program Desa Wisata Sawahan dipimpin oleh Kepala Desa melalui forum musyawarah yang melibatkan tokoh masyarakat, pegiat budaya, masyarakat desa,

serta berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek sebagai pembina. Dalam forum tersebut ditetapkan struktur kepengurusan Pokdarwis, serta dirumuskan visi, misi, dan program kerja yang difokuskan pada pengembangan paket wisata dan pembentukan unit usaha, seperti homestay.

Dalam musyawarah desa juga terdapat usulan resmi dari masyarakat terkait pemanfaatan potensi alam sebagai daya tarik utama wisata yakni berada di objek Watulawang. Usulan yang disepakati dimasukkan dalam perencanaan desa dan ditindaklanjuti melalui penyusunan rencana aksi berdasarkan skala prioritas, dengan mempertimbangkan sumber daya dan potensi yang dimiliki.



Gambar 4. Objek Wisata Watulawang

Sumber : Dokumentasi peneliti
(2025)

lokasi Watulawang yang dijadikan lokasi prioritas desa wisata yang ada di Sawahan kemudian Ketua Pokdarwis diberi wewenang untuk menyusun berbagai kegiatan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat dengan tetap berpedoman pada petunjuk teknis serta Rencana Anggaran Belanja (RAB). Pendanaan awal program bersumber dari APBDesa, termasuk penyertaan modal awal sebesar Rp10.000.000, sedangkan sisanya berasal dari swadaya masyarakat. Dinas juga berperan dalam pendampingan penyusunan paket wisata.

Secara keseluruhan, tahap perumusan program dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan aktor lokal dan dukungan pemerintah daerah guna memastikan program selaras dengan kebutuhan serta potensi Desa Sawahan.

c. Tahap pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, Pokdarwis Duren Sari menjalankan berbagai kegiatan pengelolaan Desa Wisata Sawahan, Sosialisasi kepada masyarakat terus dilakukan oleh pengelola Pokdarwis dengan dukungan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek. Sosialisasi pelaksanaannya tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga melalui media massa dan media sosial, seperti Instagram dan TikTok, agar masyarakat dapat mengetahui secara lebih jelas berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Pokdarwis Duren Sari. termasuk penjualan paket wisata sesuai dengan pembagian tugas masing-masing anggota. Penyampaian informasi kepada masyarakat dilakukan baik melalui pertemuan secara langsung maupun dengan memanfaatkan media sosial, dengan dukungan promosi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek.



Gambar 5. Pamflet Promosi Desa Wisata Sawahan

Sumber : Instagram Desa Wisata Sawahan (@desawisatadurensari), diakses pada 24 Januari 2026.

Dinas juga berkontribusi melalui pendampingan penyusunan profil desa wisata serta pelatihan pengelolaan.

Namun, pelaksanaan pelatihan masih bersifat sentralistik dan hanya melibatkan perwakilan tertentu dari masing-masing desa. Meskipun pola ini dipandang sebagai bentuk efisiensi dan pemerataan, dalam praktiknya kurang efektif karena berpotensi menimbulkan kesenjangan

pengetahuan (*knowledge gap*), lemahnya transfer pengetahuan, serta implementasi yang parsial di lapangan. Materi pelatihan yang bersifat umum dan tidak kontekstual juga belum sepenuhnya menjawab kebutuhan teknis Desa Wisata Sawahan.

Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya peningkatan kapasitas pengelola, khususnya dalam bidang pemanduan wisata dan pengelolaan homestay. Terakhir, pelatihan tercatat dilaksanakan pada tahun 2019, sehingga terjadi stagnasi pengembangan sumber daya manusia. Apabila tidak dirancang pelatihan yang lebih terstruktur dan berbasis kebutuhan, kualitas layanan dan daya saing Desa Wisata Sawahan berpotensi mengalami hambatan dalam jangka panjang.

d. Tahap Evaluasi

Pada tahap evaluasi, Pemerintah Desa Sawahan berperan sebagai aktor utama dalam melakukan penilaian terhadap kinerja pengelolaan Desa Wisata Sawahan. Evaluasi dilakukan melalui kegiatan monitoring yang bertujuan menilai pelaksanaan program, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan solusi secara bersama. Secara normatif, evaluasi direncanakan setiap enam bulan sekali.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi internal oleh Pokdarwis Duren Sari belum berjalan optimal karena belum adanya jadwal yang terstruktur dan berkelanjutan. Pertemuan antar anggota umumnya hanya dilakukan saat terdapat kunjungan tamu penting, sehingga fungsi evaluasi menyeluruh terhadap program belum terlaksana secara maksimal.

Sementara itu, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek tidak terlibat secara langsung dalam proses evaluasi di tingkat desa, melainkan menerima laporan rutin mengenai jumlah kunjungan dan perkembangan potensi desa wisata. Dengan demikian, pengelolaan dan pengawasan operasional Desa Wisata Sawahan lebih dominan berada pada tingkat desa.

2. Jenis Kebijakan yang Mendorong Masyarakat untuk Mengerjakan Sendiri Kebijakannya atau Masih Melibatkan Pejabat Pemerintah di Level Bawah

Menurut model *bottom-up* yang dikemukakan oleh Elmore, Lipsky, Hjern, dan O'Porter, implementasi kebijakan memberi ruang kepada masyarakat untuk berperan langsung, sementara pejabat pemerintah berada pada tingkat paling bawah sebagai pelaksana kebijakan di tingkat lapangan (*street-level bureaucrats*) yang memberikan legitimasi, pendampingan, dan memiliki diskresi dalam pelaksanaannya (Lipsky, dalam Nugroho). Dalam konteks Desa Wisata Sawahan, pelaksanaan berbagai unit usaha dijalankan oleh warga setempat melalui wadah Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Duren Sari, yang menjadi pengelola utama program desa wisata. Keterlibatan anggota Pokdarwis umumnya bersifat sampingan, sehingga imbalan yang diterima berupa upah lelah saat ada kunjungan wisatawan. Partisipasi masyarakat, terutama kalangan pemuda, masih terbatas baik dalam struktur kepengurusan maupun dalam pelaksanaan kegiatan wisata. Pelaksanaan program desa wisata diwujudkan melalui pengelolaan paket wisata dan unit usaha homestay yang dijalankan oleh Pokdarwis. Paket-paket wisata yang ditawarkan meliputi Jelajah Alas Duren (*Trekking IDF/International Durio Forestry*), Dolan Bareng ing Watulawang (Outbound Watulawang), Adventure to The Ngrancah, dan Paket Edukasi. Selain itu, tersedia pula paket wisata menginap atau tinggal bersama masyarakat Desa Sawahan (*Live In*), yang terdiri atas *Live In* Paket Duren 1 (1 hari 1 malam), *Live In* Paket Duren 2 (2 hari 1 malam), dan *Live In* Paket Duren 3 (3 hari 2 malam). Selain paket wisata ada unit homestay. Unit homestay yang awalnya hanya berjumlah enam unit pada 2015 kini berkembang menjadi 23 unit, dikelola langsung oleh masyarakat dengan pendampingan Pokdarwis.

Pemerintah desa berperan sebagai birokrat level bawah yang memberikan legitimasi, pendampingan, dan ruang kewenangan tanpa terlibat langsung dalam operasional kegiatan wisata. Sementara itu, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek berperan sebagai fasilitator dengan memberikan dukungan pembangunan dan perbaikan infrastruktur, terutama akses jalan ke

kawasan wisata, serta koordinasi dengan dinas teknis terkait

Pendekatan ini sesuai dengan Parsons (2005:471) yang menyatakan bahwa model *bottom-up* memberi keleluasaan bagi aktor pelaksana menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lokal. Dengan demikian, pengelolaan Desa Wisata Sawahan menunjukkan dominasi masyarakat dalam implementasi program.

3. Kebijakan yang Dibuat Sesuai dengan Harapan atau Keinginan Publik yang Menjadi Target

Menurut model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Michael Lipsky, Benny Hjern, dan David O'Porter dalam Tahir, dijelaskan bahwa kebijakan publik harus dirancang selaras dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat sebagai target kebijakan. Implementasi dapat dilakukan langsung oleh masyarakat dengan keterlibatan pejabat pemerintah pada level bawah sebagai fasilitator.

Pengelolaan Desa Wisata Sawahan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2021 tentang Desa Wisata, yang menetapkan sejumlah tujuan, antara lain meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan usaha baru, mengembangkan potensi alam dan budaya, meningkatkan kesadaran konservasi lingkungan, menumbuhkan kebanggaan terhadap identitas desa, memperjelas peran para pihak, serta memberdayakan masyarakat melalui penguatan ekonomi lokal berbasis pariwisata.

Secara implementatif, tujuan peningkatan kesejahteraan diwujudkan melalui pembentukan unit usaha seperti homestay, jasa kuliner, dan pemandu wisata yang dikelola masyarakat. Namun demikian, pendapatan dari sektor pariwisata belum stabil karena kunjungan wisatawan masih bersifat musiman, khususnya bergantung pada musim durian. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat tetap bekerja di luar desa karena sektor pariwisata belum sepenuhnya mampu menjadi sumber penghasilan utama yang berkelanjutan.

Dari perspektif pemerintah desa, program desa wisata diharapkan mampu meningkatkan perekonomian warga secara

stabil sehingga mengurangi urbanisasi tenaga kerja. Sementara itu, tokoh masyarakat menekankan pentingnya pelestarian budaya lokal agar kegiatan wisata tidak hanya berorientasi pada komoditas durian, tetapi juga mengangkat kearifan lokal, seni, dan tradisi desa.

Tujuan pelestarian lingkungan dan optimalisasi potensi desa diwujudkan melalui pengelolaan kawasan seperti Hutan Durian dan Sungai Watulawang dengan tetap menjaga keasrian alam serta membatasi pembangunan fisik. Pendekatan pariwisata berbasis masyarakat juga tercermin dari keterlibatan warga dalam pengelolaan homestay, jasa kuliner, dan usaha pendukung lainnya.

Secara umum, tujuan kebijakan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah telah berupaya selaras dengan harapan masyarakat Desa Sawahan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat tantangan, khususnya pada aspek keberlanjutan ekonomi dan stabilitas pendapatan masyarakat dari sektor pariwisata. Dengan demikian, kebijakan desa wisata telah mencerminkan aspirasi publik, meskipun implementasinya masih memerlukan penguatan supaya dampaknya bisa diperoleh secara optimal dan berkelanjutan.

4. Prakarsa Masyarakat Secara Langsung atau Melalui Lembaga Swadaya Masyarakat

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2021 tentang Desa Wisata menegaskan bahwa pengelolaan desa wisata dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat dan/atau badan usaha. Dalam konteks Desa Wisata Sawahan, pengelolaan dilakukan melalui Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Duren Sari, yang seluruh anggotanya merupakan warga setempat Desa Sawahan. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya ruang partisipasi yang luas bagi warga setempat berperan sebagai pelaku utama dan sebagai aktor kunci dalam mengelola desa wisata.

Selaras dengan teori implementasi kebijakan *bottom-up* yang dikembangkan oleh Richard Elmore, Michael Lipsky, Benny Hjern, dan David O'Porter prakarsa kebijakan pada level implementasi dapat berasal dari masyarakat secara langsung maupun melalui kelembagaan

lokal. Prakarsa masyarakat Desa Sawahan terlihat sejak tahap awal pembentukan desa wisata. Pokdarwis Duren Sari dibentuk melalui musyawarah desa pada Oktober 2015, setelah Penetapan Desa Sawahan sebagai desa wisata dilakukan oleh Bappeda Provinsi Jawa Timur. Dalam proses tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga terlibat aktif dalam pengambilan keputusan dan penyusunan struktur organisasi pengelola.

Dalam pelaksanaannya, masyarakat berperan sebagai pelaku utama dalam berbagai aktivitas pariwisata, seperti pengelolaan paket wisata, jasa pemandu, homestay milik warga, penyediaan kuliner khas desa, serta pengembangan atraksi berbasis potensi lokal. Keterlibatan masyarakat juga tampak pada setiap tahapan implementasi kebijakan, mulai dari perencanaan melalui musyawarah internal, pelaksanaan kegiatan wisata dan pengelolaan unit usaha, hingga evaluasi program untuk mengidentifikasi kendala dan merumuskan perbaikan.

Prakarsa masyarakat tersebut didukung oleh Pemerintah Desa Sawahan yang berperan sebagai fasilitator, antara lain melalui penyertaan modal dari dana desa untuk pembangunan sarana pendukung wisata, seperti gazebo di kawasan Watulawang. Selain itu, Melalui instansi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Pemerintah Kabupaten Trenggalek memberikan dukungan berupa pembangunan fasilitas penunjang, seperti gapura kawasan wisata, serta fasilitasi perbaikan akses jalan melalui koordinasi lintas dinas. Dukungan tersebut bersifat pendampingan dan tidak mengambil alih kewenangan pengelolaan yang tetap berada pada masyarakat.

Dengan demikian, meskipun penetapan Desa Wisata Sawahan berawal dari kebijakan pemerintah provinsi, pengelolaan dan pengembangannya secara substantif diprakarsai dan dijalankan oleh masyarakat melalui Pokdarwis Duren Sari. Pemerintah desa dan pemerintah kabupaten berperan sebagai fasilitator, sementara masyarakat tetap menjadi aktor utama dalam implementasi kebijakan desa wisata.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan analisis terhadap implementasi Program Desa Wisata di Desa Sawahan, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, dapat ditarik kesimpulan bahwa program tersebut telah dilaksanakan dengan merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2021 tentang Desa Wisata. Namun, implementasinya belum sepenuhnya mencapai tujuan yang diharapkan. Kendala utama terletak pada kapasitas sumber daya manusia pengelola yang masih terbatas, ketergantungan kegiatan wisata pada musim durian yang menyebabkan fluktuasi kunjungan wisatawan, serta belum terjadwalnya evaluasi internal oleh Pokdarwis secara berkelanjutan. Kondisi tersebut berdampak pada belum stabilnya pendapatan masyarakat dan optimalisasi pengelolaan desa wisata.

Pada Identifikasi Jaringan Aktor yang Terlibat Implementasi Program Desa Wisata Sawahan menunjukkan bahwa pengelolaan dilakukan melalui jaringan aktor yang melibatkan Pokdarwis Duren Sari sebagai pelaksana utama, dengan dukungan pemerintah desa sebagai birokrat level bawah dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek sebagai fasilitator. Seluruh aktor tersebut telah melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dengan baik, walaupun pada tingkatan kabupaten, dinas pariwisata kurang dalam memberikan bantuan pelatihan peningkatan kapasitas SDM untuk Pokdarwis. Selain itu, masih terdapat hambatan dalam koordinasi antar aktor serta pelaksanaan evaluasi dan monitoring yang belum berjalan secara maksimal sebagai sarana perbaikan kinerja pengelolaan Desa Wisata Sawahan.

Jenis kebijakan publik yang diterapkan memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengelola sendiri implementasi program desa wisata. Hal ini tercermin pada pengelolaan unit-unit usaha, seperti paket wisata dan homestay, yang dijalankan oleh Pokdarwis Duren Sari. Masyarakat Desa Sawahan berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan wisata melalui kelembagaan lokal tersebut. Namun, tingkat partisipasi masyarakat belum merata, terutama di kalangan pemuda dan remaja, sehingga keterlibatan mereka dalam struktur

kepengurusan dan pelaksanaan kegiatan wisata masih tergolong rendah.

Kebijakan pembentukan Desa Wisata Sawahan pada dasarnya selaras dengan harapan dan keinginan masyarakat sebagai kelompok sasaran. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek tentang Desa Wisata menetapkan tujuan yang mendukung peningkatan kesejahteraan, pengembangan potensi lokal, serta pelestarian lingkungan dan budaya desa. Pelaksanaan kebijakan melalui pengelolaan paket wisata dan unit usaha oleh Pokdarwis Duren Sari bersama pemerintah desa telah berupaya mewujudkan tujuan tersebut. Namun, masyarakat masih berharap agar desa wisata dapat memberikan pendapatan yang lebih stabil dan berkelanjutan, karena aktivitas wisata saat ini masih bersifat musiman sehingga manfaat ekonominya belum optimal.

Implementasi Program Desa Wisata Sawahan menunjukkan bahwa prakarsa pengelolaan berasal dari masyarakat secara langsung tanpa keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Meskipun penetapan awal desa wisata merupakan rekomendasi dari Bappeda Provinsi Jawa Timur, pembentukan dan pengelolaan Pokdarwis Duren Sari merupakan hasil inisiatif masyarakat Desa Sawahan melalui musyawarah desa. Dalam pelaksanaannya, masyarakat berperan sebagai aktor utama dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan desa wisata. Pemerintah Desa Sawahan dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek berperan sebagai fasilitator melalui dukungan penyertaan modal dan penyediaan sarana pendukung. Dengan demikian, implementasi kebijakan Desa Wisata Sawahan mencerminkan model *bottom-up*, di mana masyarakat menjadi pelaku utama dalam menjalankan dan mengembangkan program desa wisata.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran terkait Implementasi Program Desa Wisata di Desa wisata Sawahan Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek yaitu sebagai berikut:

1. Terkait kurangnya koordinasi antar anggota, ketua Pokdarwis diharapkan dapat melaksanakan evaluasi dan pertemuan secara rutin serta terjadwal. Dengan demikian, pelaksanaan program Desa Wisata Sawahan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, sehingga pertemuan tidak hanya dilakukan pada saat adanya tamu penting atau kegiatan tertentu saja.
2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek diharapkan meningkatkan pelatihan peningkatan kapasitas SDM bagi anggota Pokdarwis Duren Sari. Mengingat sebagian besar pengelola masih mengandalkan pengalaman, pelatihan perlu difokuskan pada kebutuhan Desa Wisata Sawahan, seperti manajemen pengelolaan, pelayanan wisata, pemanduan, pemasaran digital serta pengelolaan keuangan. Pelaksanaan pelatihan sebaiknya tidak hanya diberikan kepada perwakilan, tetapi melibatkan seluruh anggota agar peningkatan kapasitas lebih sehingga mampu meningkatkan profesionalitas pengelola dan mengoptimalkan pengembangan desa wisata.
3. Selanjutnya, partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda, perlu terus didorong agar terlibat aktif dalam pelaksanaan pengelolaan sekaligus pengembangan Desa Wisata Sawahan salah satunya dengan Menggandeng kelompok karang taruna. Keterlibatan pemuda diharapkan mampu menghadirkan inovasi serta menjaga keberlanjutan desa wisata di masa mendatang.
4. Pemerintah Desa bersama Pokdarwis Duren Sari perlu mendorong pengembangan atraksi wisata yang tidak hanya bergantung pada musim tertentu agar jumlah kunjungan wisatawan dapat meningkat dan manfaat ekonomi dapat dirasakan secara lebih konsisten oleh masyarakat. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pengembangan potensi wisata budaya Desa Wisata Sawahan yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal, salah satunya dengan menyediakan baju khas desa yang dapat dikenakan wisatawan sebagai bagian dari pengalaman wisata budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Devi, S. S., & Rahaju, T. (2025). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Desa Wisata Simathani Marurup Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Negara*, 2(3), 24–51.
<https://doi.org/10.62383/hukum.v2i3.261>
- Giampiccoli, A. (2020). Community-based tourism: Origins and present trends. *African Journal for Physical Health Education, Recreation and Dance*, 21(2), 675–687.
- Jadesta Jawa Timur. (2024). Desa Wisata Duren Sari Sawahan. https://jatim.jadesta.com/desa/duren_sari_sawahan
- Jadesta Kemenparekraf. (2025). Jatim Jadesta. <https://jatim.jadesta.com/>
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2021). ADWI 2021 : 4000 Desa Wisata [Siaran pers]. Mei. <https://jadesta.kemenparekraf.go.id/berita>
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2025). Peta Sebaran – Jejaring Desa Wisata (Jadesta). <https://jadesta.kemenparekraf.go.id/sebaran>
- Kementerian Pariwisata, & Ekonomi Kreatif. (2023). Kemenparekraf Perkuat Peran Masyarakat dalam Pengembangan Potensi Desa Wisata. <https://jadesta.kemenparekraf.go.id/berita/130632>
- Mandasari, O. P., & Prabawati, I. (2021). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. *Publika*, 8(4), 1–10.

- Parsons, D. W. (2005). *Public policy: An introduction to the theory and practice of policy analysis*. Edward Elgar Publishing.
- Pemerintah Kabupaten Trenggalek. (2021). *Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2021 tentang Desa Wisata*.
- Pitana, I. G., & Gayatri, P. G. (2005). *Sosiologi pariwisata: kajian sosiologis terhadap struktur, sistem, dan dampak-dampak pariwisata*. Andi. <https://books.google.co.id/books?id=ni4NwAACAAJ>
- Pradana, G. W., Rahman, A. Z., & Haryonno, H. (2021). *Tourism Village Management Requires Good Tourism Governance: Study in the Kampung Lampion Code 18 Yogyakarta*. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 6(1), 20–27. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v6n1.p20-27>
- Santoso, S., Pradipta, S., Sumantono, T., & Fatmawati, A. A. (2021). *Pengembangan Desa Wisata berkonsep Kapasitas Inovasi Daerah di Desa Tanjungjaya, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten*. *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, 29(2).
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif*. Alfabeta.
- Sun, L., Qin, L., Chen, Y., Meng, T., & Wang, L. (2025). *The Dynamics and Interactive Mechanisms of Tourism Development in Ethnic Villages: A Case Study of Guilin's Longji Rice Terrace Scenic Spot*. *Journal of Resources and Ecology*, 16(4), 1231–1240. <https://doi.org/10.5814/j.issn.1674-764x.2025.04.025>
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. API Banduung.
- Tamianingsih, & Eprilianto, D. F. (2022). *Partisipasi masyarakat dalam pengembangan Community Based Tourism (studi kasus Desa Wisata Ketapanrame, Kabupaten Mojokerto)*. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(3), 1025–1040. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n3>
- Trenggalek Satu Data. (2024, March). *Data kunjungan destinasi wisata: Kabupaten Trenggalek tahun 2024*. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kabupaten Trenggalek. https://satudata.trenggalekkab.go.id/data_opd/415/data-kunjungan-destinasi-wisata
- United Nations World Tourism Organization. (2021, September 1). *The importance of tourism for sustainable development*. <https://www.unwto-tourismacademy.ie.edu/2021/09/the-importance-of-tourism-for-sustainable-development>
- Widodo, J. (2021). *Strategi Pengembangan Objek Wisata Rumah Apung Bangsring Underwater di Kecamatan Wongosorejo Kabupaten Banyuwangi*. *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 13(1), 15. <https://doi.org/10.19184/jpe.v13i1.10412>
- World Travel & Tourism Council. (2024). *Travel & Tourism Economic Impact Research (EIR): What is the Economic Impact of Travel & Tourism?* <https://wttc.org/research/economic-impact/economic-research/economic-impact-analysis/league-table-summary>
- Zheng, S., Chen, X., & Wang, L. (2024). *Better Ways for the Intergration of Educational Tourism and Rural Revitalization at Guilin Village China*. *Asian Journal of Education and Social Studies*.